

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI- ORGANISASI ISLAM: MUHAMMADIYAH, NAHDATUL ULAMA DAN JAMI'ATUL WASHLIYAH

M. Fadli

Dosen FITK IAIN Langsa Banda Aceh; m.fadli@iainlangsa.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Organization;
Islamic;
Development

Article history:

Received 2020-08-15

Revised 2020-11-12

Accepted 2021-01-17

ABSTRACT

Awareness of organization with a very high effort and imbued with feelings of nationalism and religion led to developments and a new era in education and teaching. With full awareness, the leaders of the movement tried to change the backwardness of the Indonesian people through the implementation of national education. Their efforts are realized by establishing schools and madrasas with a modern system by adopting a Western education system that teaches general subjects and religious subjects. Evidence of this development is until the birth of Islamic universities in Indonesia. The role of these organizations can be extraordinary, both in the fields of economy, education, politics and in achieving independence for the Indonesian state. We also feel this until now where many Islamic organizations still exist and maintain stability in Indonesia within a government.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

M. Fadli

Dosen FITK IAIN Langsa Banda Aceh; m.fadli@iainlangsa.ac.id

PENDAHULUAN

Berakhirnya perang Dunia I pada tahun 1918 tidak sedikit membawa perubahan keseluruhan dunia, termasuk dunia Islam yang sebagian besar dalam

keadaan dijajah oleh Eropa. Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam tidak luput dari jajahan bangsa Eropa yang kala itu Indonesia merupakan daerah jajahan dari negara Belanda. Masyarakat Indonesia juga berupaya mengobarkan gejolak untuk merdeka dari penjajahan atas tanah air mereka. Mereka berupaya meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu mereka seperti: Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, dan lain-lainya, sehingga tidak mengherankan kalau pada saat itu bermunculan gerakan-gerakan kemerdekaan yang pertama kali dipelopori oleh umat Islam kala itu.

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak karena adanya dorongan oleh tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respon terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada awal abad ke 19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk kesadaran berorganisasi. Disamping sebagai gerakan kemerdekaan, organisasi- organisasi Islam juga bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam. Salah satunya adalah mengantisipasi kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda yaitu upaya untuk menutup peluang pengembangan institusi dan sistem pendidikan Islam di Indonesia karena lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dianggap sebagai sarang pembrontak.

Kesadaran berorganisasi dengan usaha yang sangat tinggi serta dijiwai perasaan nasionalisme dan keagamaan, menimbulkan perkembangan dan era baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Dengan kesadaran penuh, para pemimpin pergerakan berusaha mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional. Usaha mereka diwujudkan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah

dengan sistem modern dengan mengadopsi sistem pendidikan Barat yang mengajarkan pelajaran umum disamping materi pelajaran agama. Bukti dari perkembangan itu adalah hingga lahirnya perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Al-Washliyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan pendidikan Islam menjadi suatu kajian yang teramat penting bagi semua kalangan terutama para intelektual muslim dan para tokoh pendidikan Islam. Melalui kajian pada tulisan ini diharapkan pembaca dapat mengambil pengalaman berharga dalam mengembangkan masyarakat Islam dan pendidikan Islam dengan segala Intrik dinamikanya.

MUHAMMADIYAH

A. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya adalah K.H. Abubakar bin Haji Sulaiman, seorang khatib pada masjid Sultan Yogyakarta (Witjosukarto, 1966). Sebagai seorang anak dari keluarga yang taat beragama, tentu saja Dahlan sejak kanak-kanak telah menggeluti pendidikan agama seperti Alquran, hadis, fikih, tafsir, nahu, saraf di berbagai lembaga pendidikan agama di sekitar Yogyakarta. Pendidikan yang demikian menghantarkannya menjadi seorang yang memiliki pengetahuan agama yang kuat. Sementara ilmu pengetahuan lainnya, kecuali ilmu falak, kelihatannya memang tidak digelutinya. Pengetahuan dan pemahamannya

dalam bidang agama semakin dalam ketika Dahlan berkesempatan belajar ke Tanah Suci Makkah selama tiga tahun dalam dua kali kunjungan (Noer, 1980).

Kunjungan pertama ketika Dahlan menunaikan ibadah haji pada tahun 1890 dan kemudian menetap dan belajar di kota suci ini selama satu tahun. Pada tahun 1903 ia berangkat lagi ke Makkah untuk yang kedua kalinya dan menetap di sana selama dua tahun. Salah seorang gurunya ketika belajar di Makkah ialah Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama besar yang berasal dari Minangkabau yang sudah terkenal sebagai seorang yang cukup lantang menentang tarekat Naqsyabandiyah (Siddik, 2017) dan masalah pembagian harta warisan yang berlaku di daerah tanah kelahirannya di Minangkabau. Sebagai seorang murid Ahmad Khatib tentu saja Dahlan pada saat itu telah berkenalan dengan pemikiran pembaharuan yang berkembang di Timur Tengah. Apalagi pada masa itu gagasan pembaharuan Timur Tengah terutama yang dipelopori gerakan Wahabiyah dengan segera menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia yang dibawa oleh jamaah haji Indonesia yang kembali dari Hijaz maupun melalui penyebaran jurnal-jurnal pembaharuan semacam al-'Urwatul Wutsqâ atau al-Manâr (Shihab, 1998). Pergumulan Dahlan dengan ide-ide pembaharuan baik yang diterimanya langsung dari guru-gurunya maupun melalui bacaannya terhadap berbagai buku menyebabkan Dahlan memiliki keinginan yang kuat untuk menerapkan ide-ide pembaharuan itu di tanah kelahirannya di Yogyakarta.

Hal ini jelas terlihat dari kegelisahan Dahlan menyaksikan keadaan bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang terbelenggu dalam berbagai keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang sistematis sebagai dampak dari perlakuan penjajahan Belanda; dan didorong pula oleh pengalamannya dalam menyaksikan gelombang pembaharuan yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Hal itulah yang kemudian membuahkan tekad bagi Dahlan

untuk berkontribusi melakukan perubahan ke arah yang diinginkan, sebagai muara dari keprihatinannya menyaksikan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya.

Jika diperinci, paling tidak keprihatian Dahlan tersebut terfokus pada tiga hal;

Pertama, keprihatinannya terhadap bentuk kepercayaan dan pengamalan agama masyarakat Jawa yang cenderung sinkretis. Hal ini sebagai muara dari praktik keagamaan yang berlangsung di kalangan masyarakat Jawa khususnya di daerah- daerah bekas kerajaan besar Mataram Jawa, Yogyakarta, tempat kelahiran Dahlan, sebagai salah satu daerah yang sangat kuat dalam tradisi Hindu-Jawa (Shihab, 1998). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang membangkitkan semangat keagamaan Dahlan untuk mengadakan pemurnian ajaran dan amalan Islam dari unsur-unsur takhayul, bidah, dan khurafat.

Kedua, keprihatinannya terhadap kondisi dan penyelenggaraan pendidikan agama yang secara metodologik jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan sekolah-sekolah gubernemen. Dalam pengamatan Dahlan bahwa pendidikan umat Islam yang terpusat di pondok- pondok pesantren tidak efisien; selain disebabkan metodologi pengajarannya yang kurang efektif, juga kurang membekali santrinya dalam bidang ilmu pengetahuan umum yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan duniawi. Sedangkan di sekolah- sekolah gubernemen yang secara metodik dan teknik

penyelenggaraannya lebih modern, tetapi karena isi bidang studinya tidak bersentuhan dengan iman dan kesalehan sebagai tujuan fundamental pendidikan Islam, menyebabkan sekolah ini pun tidak dapat diharapkan menjadi alternatif bagi pendidikan umat Islam (Siddik, 1997). Dampak yang ditumbuhkannya tidak saja sekadar terjadinya jurang pemisah antara golongan intelegensia yang berlatar belakang pendidikan umum dengan ulama yang berlatar belakang pendidikan pesantren, tetapi lebih dari itu menimbulkan kurang-pedulian kalangan intelegensia terhadap persoalan agama, bahkan sebagiannya cenderung memusuhi agama.

Ketiga, keprihatinannya menyaksikan kegiatan para misionaris Kristen yang sudah sangat intens di Jawa Tengah sejak penghujung abad ke-19. Misi-misi tersebut berpengaruh besar dalam program-program pendidikan pemerintah kolonial. Bagi Dahlan, sekalipun tidak disuarakannya secara lantang, tetapi hal ini diterjemahkannya sebagai keinginan pemerintah kolonial untuk mengkristenkan Jawa, dan karena itu dia ingin meningkatkan kualitas beragama masyarakat guna membatasi pengaruh misionaris tersebut (Muhammadiyah, 1989).

Para penulis tentang Muhammadiyah hampir tidak pernah mengabaikan sebuah fakta sejarah bahwa gerakan pembaharuan yang awal sekali dilakukan Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah adalah ketika dia, pada tahun 1898, berusaha mengubah arah kiblat di masjid Kesultanan Yogyakarta yang dinilainya tidak mengarah ke Ka'bah. Tindakan Dahlan yang dipandang oleh banyak kalangan bertentangan dengan tradisi agama yang berlangsung secara turun-temurun itu segera mendapat tantangan bukan hanya

dari kiai- kiai tua yang konservatif, tetapi juga dari penguasa, meskipun pada lahirnya sultan bersikap netral dalam peristiwa tersebut. Tantangan ini dapat dipandang sebagai salah satu kegagalan Dahlan dalam merealisasikan cita-citanya khususnya di lingkungan istana. Boleh jadi itulah sebabnya mengapa ia lebih banyak melakukan kegiatannya di dalam masyarakat dan di dalam dunia pendidikan daripada di dalam keraton yang kaya dengan tradisi dan berbagai kepercayaan yang sinkretis. Walaupun Dahlan merupakan salah seorang khatib pada masjid di Kesultanan Yogyakarta yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (1896), akan tetapi kehidupan sebagai pedagang batik yang telah digelutinya sejak beliau masih muda, menyebabkan sosok Dahlan menjadi lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat di luar keraton.

Di luar keratonlah Dahlan berusaha memperbaiki sikap hidup masyarakat dengan mengajarkan kepada mereka ajaran- ajaran sosial dalam agama, seperti gotong royong, menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan tolong menolong. Kepada murid- muridnya ia menanamkan sifat tersebut dengan mempraktikkannya secara langsung, sehingga murid-murid dapat melihat dan menghayati nilai-nilai positif yang terkandung dalam agama.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Dahlan telah bergabung dengan organisasi Budi Utomo (1909), dengan maksud untuk memperoleh peluang guna menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam kelompok kebudayaan ini. Karena Dahlan memang memiliki sikap rasional dan dapat menerima pemikiran modern menyebabkan kehadirannya dalam organisasi ini disambut dengan hangat bahkan cukup berpengaruh, yang menyebabkannya memperoleh posisi sebagai salah seorang komisaris pada cabang Budi Utomo Yogyakarta. Pada tahun 1910 Dahlan bergabung pula ke dalam organisasi Jami'at Khair sebuah organisasi Islam yang didirikan di Jakarta tahun 1905 sebagai tempat berhimpun

umat Islam tanpa diskriminasi, sekalipun mayoritas anggotanya adalah orang Arab (Noer, 1980).

Semangat pembaharuan dan atmosfer intelektual yang dikembangkan organisasi ini, menjadi daya pikat bagi Dahlan untuk bergabung di dalamnya. Melalui Jami'at Khair inilah Dahlan semakin mengenal berbagai jurnal modernis dari Timur Tengah, seperti al- Manâr, al-'Urwah al-Wutsqâ dan karya-karya modernis lain yang dibawa oleh para guru Arab yang datang mengajar di sekolah-sekolah organisasi tersebut. Bahkan setelah mendirikan Muhammadiyah pun pada tahun 1912, Dahlan masih bergabung dalam organisasi politik, Sarekat Islam, yang diberi kedudukan sebagai penasihat. Dalam berbagai kegiatan inilah, menurut beberapa penulis Dahlan memperoleh pengalaman berharga dalam menata Muhammadiyah menjadi organisasi yang bertalenta modern. Dari Jami'at Khair ditimbanya semangat intelektualisme keagamaan, dari Sarekat Islam dia berkenalan antusiasisme politik dan dalam Budi Utomo dapat dirasakannya sentuhan revivalisme kebudayaan (Shihab, 1998).

Di tengah kosmopolitalisme pergaulannya sebagai pedagang batik, perjalanannya melaksanakan ibadah haji, belajar kepada berbagai guru di Makkah, pergumulannya dalam berbagai organisasi dan bacaan-bacaannya, menjadikan Dahlan berpikir keras untuk melakukan perubahan demi kemajuan umat Islam yang sedang mengalami keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Pergumulan pemikiran itulah yang kemudian mendorongnya "untuk mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 yang berusaha melakukan pencerahan di tengah kemurahan nasib bangsanya. Melalui organisasi yang teraturlah, menurut pendapatnya, sebuah kekuatan baru dapat diorganisir, apalagi situasi pada masa itu berbagai organisasi yang bersifat keagamaan dan politik mulai bermunculan. Usaha Dahlan yang demikian

mendapat sokongan dari bekas murid-muridnya dan dari merekalah ia mendapat dukungan bagi organisasinya yang baru itu. Tercatat sembilan orang pimpinan Muhammadiyah pada masa awal itu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan (Ketua), Abdullah Siradj (Sekretaris), Haji Achmad, Haji Abdurrahman, Haji Sarkawi, Haji Muhammad, Raden Haji Djaelani, Aji Anies, dan Haji Muhammad Pakih (Alfian, 1999).

Dipilihnya nama “Muhammadiyah” sebagai nama organisasi yang didirikannya itu, selain secara harfiah mengandung arti “pengikut Muhammad” juga berkaitan erat sikap keagamaan yang diintrodusir Dahlan yang tidak terikat pada mazhab tertentu atau sebagai pengikut ulama tertentu, melainkan semata-mata *ittiba’* kepada Nabi Muhammad saw (Suwamo, 1986). Kecuali itu nama Muhammadiyah tersebut terkait pula dengan tujuan Muhammadiyah pertama sekali didirikan yaitu “menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. kepada penduduk bumi putra di dalam residensi Yogyakarta, dan memajukan hal agama Islam kepada anggota- anggotanya (Muhammadiyah, 1989).

Terlihat jelas bahwa sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, esensi tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai takhayul, bid’ah dan khurafat. Di samping itu organisasi ini memunculkan praktik-praktik ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti salat Hari Raya di tanah lapang, Salat tarawih 11 rakaat, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya. Kegiatan sosial lainnya, sedikit- banyak telah mengadopsi kegiatan

zending Kristen, dan berhasil menghambat laju perkembangan zending tersebut pada daerah-daerah tertentu.

Secara agak terperinci kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, yang terasa berbeda pada masa itu dengan praktik-praktik keagamaan yang dilakukan umat Islam pada umumnya, antara lain adalah penentuan arah kiblat yang tepat dalam salat sebagai koreksi dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat (Azra, 1990), penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa (*hisâb*), yang nyata-nyata berbeda dengan melakukan *ru'yah* atau pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama, dan menyelenggarakan salat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha, sebagai ganti dalam salat serupa dalam jumlah jamaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid.

Melalui kegiatan-kegiatan di atas, Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang modern yang tampil di tengah-tengah masyarakat Islam yang sedang menghadapi krisis. Dengan gaya dan metodenya yang khas, tanpa menimbulkan kecurigaan pemerintah kolonial atau kegoncangan sosial, Muhammadiyah telah mengukuhkan dirinya sebagai organisasi pembaharu. Kedudukan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan sebagaimana banyak dikemukakan oleh para peneliti dan penulis tentang Muhammadiyah terletak pada upaya-upaya kreatifnya dalam mengubah, memperbaharui dan meluruskan kembali pemikiran, persepsi, kebiasaan-kebiasan dan praktik keberagamaan (Islam) yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru (Suwamo, 1986).

B. Perkembangan Muhammadiyah

Berkenaan dengan perkembangannya dapat dicatat bahwa dalam masa empat tahun sejak berdirinya Muhammadiyah secara organisatoris hanya

berkegiatan di Yogyakarta sekalipun secara individual Dahlan dan pengurus lainnya tetap mengkampanyekan Muhammadiyah ke berbagai daerah. Barulah pada tahun 1917 daerah, operasi Muhammadiyah mulai diperluas. Permintaan untuk mendirikan Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa semakin banyak ketika Dahlan pada tahun yang sama dalam tablighnya pada Kongres Budi Utomo berhasil mempesona para pendengarnya dengan uraian-uraian yang sistematis tentang agama dan kehidupan sosial. Karena itulah Anggaran Dasar organisasi Muhammadiyah yang pada mulanya membatasi diri di daerah residensi Yogyakarta saja, haruslah terlebih dahulu diubah. Perubahan tersebut pertama sekali dilakukan pada tahun 1920 yang menyebutkan kegiatan Muhammadiyah meliputi seluruh pulau Jawa. Bersamaan dengan itu permintaan untuk mendirikan cabang ternyata tidak saja dari pulau Jawa, melainkan juga datang dari luar Jawa. Karena itu pula tahun 1921, Anggaran Dasar Muhammadiyah kembali diubah yang menyebutkan daerah operasinya di seluruh Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland; dan memajukan cara kehidupan sepanjang kemauan Agama Islam kepada lid idnya (segala sekutunya) (Noer, 1980).

Perluasan organisasi ini ke seluruh Indonesia, selain didukung oleh kepribadian Dahlan dan cara-caranya berpropaganda yang santun, toleran dan komunikatif menjadi daya tarik bagi para pendengarnya untuk segera masuk dalam rangkulan kharismatika Dahlan. Selain itu orang-orang yang telah mengenal pembaharuan Islam di Timur Tengah melihat pula pembaharuan yang agak serupa terdapat dalam Muhammadiyah. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi penyebaran pengaruh organisasi ini apalagi ide-ide tentang pembaharuan, sekalipun belum tentu utuh, memang sudah dikenal di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama perkotaan.

Perluasan cabang-cabang Muhammadiyah juga diuntungkan oleh keberadaan pedagang-pedagang dari Minangkabau di berbagai kota lainnya. Sebagian para pedagang itu, sedikit-banyak, telah berkenalan dengan pemikiran pembaharuan Islam yang masuk ke Minangkabau. Tidak mengherankan jika Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah, ayahanda HAMKA), seorang ulama terkemuka dari Minangkabau dalam perjumpaannya yang hanya sekejap dengan Dahlan di Pekalongan pada tahun 1925 segera bersimpati, dan berjanji akan mengembangkan Muhammadiyah di Minangkabau. Karena itu bukan hal yang luar biasa jika cabang Muhammadiyah yang pertama di luar Jawa adalah di Minangkabau yang berdiri tahun 1925.

Pada tahun 1927 berdiri pula cabang Muhammadiyah di Medan sebagai cabang pertama di Sumatera Utara. Pada tahun itu juga berdiri cabang-cabang Muhammadiyah di Bengkulu, Banjarmasin dan Amuntai. Tahun 1929 cabang Muhammadiyah secara resmi berdiri di Aceh dan Makassar. Tahun 1930 didirikan pula cabang Muhammadiyah Merauke. Sejak tahun 90-an dan seterusnya organisasi mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mencapai hampir semua daerah Indonesia.

Mudah dimengerti jika penyebaran Muhammadiyah di Indonesia sedikit banyak melalui interaksi kaum pedagang. Artinya, Muhammadiyah terbina antara tradisi Kauman Yogyakarta, tempat Muhammadiyah bermarkas, dan tradisi perantau yang menampakkan asal-usul dari enklave (kantong) enterpreneur. Berkembangnya Muhammadiyah di daerah lain juga berkembang di enklave enterpreneur, seperti Pekajangan di Pekalongan, Lawean di Solo, Surabaya, Kotagede di Yogyakarta, dan sebagainya. Seperti masuknya Muhammadiyah ke Minangkabau yang terjadi lewat perkenalan para pedagang Minangkabau yang berada di Pekalongan dengan Dahlan yang kerap melakukan

tabligh di daerah itu. Interaksi tersebut sangat berpengaruh di kalangan pedagang, dan akhirnya dibawa sampai ke ranah Minang.

Telah disebutkan di depan bahwa Haji Rasul yang tengah menjenguk keluarganya, A.R. Sutan Mansur, begitu tertarik dengan perbincangan yang disampaikan Kiai Dahlan, tentang “manusia mandiri”. Menurut Dahlan, manusia sebagai makhluk Allah yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Sang Maha Pencipta, namun memerlukan manusia lain untuk lebih memungkinkan dirinya menjadi manusia yang takwa. Tema itu selalu didengungkan antara lain oleh H.A. Karim Amrullah dalam usahanya menyebarkan Muhammadiyah di Sumatera Barat (Noer, 1980). Sejak itu pula para pedagang batik Sumatera yang bermukim di Pekalongan mendirikan cabang Muhammadiyah dan kemudian berhasil memengaruhi orang sederaah mereka nun jauh di pulau Sumatera. Secara ekstrem bisa digambarkan bahwa jika Kauman-Yogyakarta adalah faktor utama dari kemantapan organisasi, maka tradisi perantau adalah kultur yang selalu menggugah kemantapan dan yang selalu ingin melebarkan sayap.

Bersama dengan perluasan organisasi ke berbagai daerah di Indonesia, Muhammadiyah juga melakukan perluasan dan diversifikasi kegiatan yang dilaksanakannya. Organisasi PKU (Penolong Kesengsaraan Umum), misalnya, pada mulanya merupakan organisasi yang berdiri sendiri, dan didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada tahun 1918 guna memberikan bantuan bagi korban meletusnya gunung Kelud, pada tahun 1921 bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi bagian yang menangani kegiatan seperti pendirian rumah sakit, klinik, maupun penyaluran dana- dana untuk bencana alam (Noer, 1980).

Organisasi wanita dalam Muhammadiyah yang bernama Aisyiah didirikan pada tahun 1922. Organisasi ini memberikan perhatian yang serius terhadap peran ibu dalam pendidikan, terutama karena seorang anak pertama sekali memperoleh pendidikan tentulah dari ibunya sendiri. Hal tersebut bermakna bahwa kaum ibu memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat melalui asuhan dan pendidikan yang diberikan kepada putera puteri yang dilahirkannya. Dalam perkembangan selanjutnya, sektor kewanitaan Muhammadiyah ini berkembang dengan dibentuknya organisasi bagi remaja wanita, bernama Nasyiatul Aisyiyah (Noer, 1980).

Satu bagian yang penting dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih yang didirikan pada tahun 1927. Majelis ini berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa atau kepastian hukum tentang masalah-masalah yang diperdebatkan umat Islam, baik yang menyangkut agama dalam arti sempit maupun persoalan-persoalan lainnya. Alasan lain bagi pembentukan majelis ini adalah kekhawatiran bahwa pertikaian yang dijumpai dalam masyarakat umumnya mungkin sekali masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah sendiri dengan kemungkinan menghambat kemajuan organisasi itu. Dengan demikian, kalau pada masa-masa sebelumnya anggota Muhammadiyah memperoleh ketetapan hukum dari para ulamanya secara perorangan, maka diharapkan melalui Majelis Tarjih ini, akan ada pendapat yang mewakili organisasi dan dipedomani para pemimpin dan anggotanya.

Penyebaran dan perkembangan Muhammadiyah di Indonesia memang cukup pesat. Dalam tahun 1925 organisasi ini telah memiliki 29 cabang dengan 4.000 anggota. Dalam waktu 13 tahun kemudian yaitu tahun 1938 telah memiliki 852 cabang dengan 250.000. Pada saat itu Muhammadiyah mengelola 1.774 sekolah, 834 masjid, 31 perpustakaan umum dan mempunyai lebih 7.000 dai.

Muhammadiyah terus berkembang dan berkiprah hingga saat ini. Ini dibuktikan dengan meluasnya sayap organisasi tersebut ke hampir setiap pelosok tanah air, dengan berbagai kegiatan.

Perlu dijelaskan bahwa jaringan struktural Muhammadiyah di Indonesia terdiri atas: (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan jaringan struktural tertinggi dari seluruh level Pimpinan Muhammadiyah. (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setingkat propinsi. (3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) untuk tingkat kabupaten/kota. (4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah pada tingkat kecamatan (sub- district). (5) Pimpinan Ranting Muhammadiyah untuk tingkat pemerintahan desa. Muhammadiyah juga memiliki sejumlah majelis/badan/lembaga, yang secara fungsional menangani program-program tertentu di lingkungan Muhammadiyah. Setiap level pimpinan Muhammadiyah (baik Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah maupun Pimpinan Cabang) memiliki majelis/badan/lembaga ini. Khusus pada tingkat Pimpinan Cabang, majelis/badan/ lembaga ini disebut 'Bagian'.

Adapun majelis/badan/lembaga yang ada di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pustaka dan Dokumentasi, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Majelis Tabligh, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Ekonomi, Badan Pembinaan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Badan Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan, Lembaga Dakwah Khusus, Lembaga Kebudayaan, Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Khusus, Lembaga Pengembangan Organisasi, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, dan Lembaga Hikmah.

Selain yang disebutkan di atas, Muhammadiyah juga memiliki organisasi-organisasi otonom yang secara khusus dibentuk dalam bidang-bidang tertentu sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jaringan struktural organisasi otonom ini sama dengan struktur pimpinan Muhammadiyah, mulai tingkat pimpinan pusat sampai pimpinan ranting. Organisasi otonom ini terdiri atas Aisyiyah, yang bergerak di kalangan wanita dan ibu-ibu; Pemuda Muhammadiyah, yang bergerak di kalangan pemuda; Nasyi'atul Aisyiyah, yang bergerak di kalangan perempuan-perempuan muda; Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang bergerak di kalangan mahasiswa; Tapak Suci Putera Muhammadiyah, yang bergerak dalam aktivitas bela diri; dan Hizbul Wathan, yang bergerak dalam aktivitas kepanduan (Suprayitno, 2012).

Muhammadiyah dari masa ke masa terus tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Sampai tahun 2005, tercatat bahwa Muhammadiyah memiliki 2.461 cabang dengan 6.098 ranting yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Khusus dalam bidang pendidikan Muhammadiyah mengelola 1.128 Sekolah Dasar (SD), 1.179 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP), 509 Sekolah Menengah Umum (SMU), 209 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 1.768 Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD), 534 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 171 Madrasah Aliyah (MA), 55 Pondok Pesantren, 32 Universitas, 52 Sekolah Tinggi, 45 Akademi, dan 3 Politeknik. Sedangkan bidang amal usaha lainnya, Muhammadiyah mengelola 312 buah rumah sakit dan poliklinik, 240 Panti Asuhan, 19 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 190 Baitul Tamwil dan 88 Koperasi (Abdullah, 1967).

Semua kegiatan tersebut, besar atau kecil, pada hakikatnya merupakan upaya Muhammadiyah untuk “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai

Allah Subhanahu wa ta'ala,"sebagaimanadinyatakan dalam tujuan organisasi Muhammadiyah.

C. Pemikiran/Gagasan Tokoh Muhammadiyah

K.H. Ahmad Dahlan, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868, ia berasal dari elit keagamaan kesultanan Yogyakarta, menjadi haji tahun 1890, sekembalinya dari Mekkah, gagasannya memperbaharui Islam melalui organisasi yang dibentuknya. Hingga tahun 1925 Muhammadiyah telah mendirikan 50 buah sekolah dengan jumlah murid 4000 orang, balai pengobatan dan panti asuhan

K.H. Ibrahim, lahir 7 Mei 1874 di Yogyakarta, beliau adik Nyai Ahmad Dahlan. Pada masa ini Muhammadiyah mengalami perkembangan yang pesat. Gagasannya adalah 1) kaum ibu supaya rajin beramal dan beribadah, senantiasa mengingat Allah, rajin menjalankan perintah agama Islam, 2) pengajian model sorogan, yaitu belajar privat bersifat individual terutama untuk anak-anak muda, dan model weton, yaitu cara mengajar mengaji kyai membaca sedang santri-santrinya mendengarkan dengan memegang kitabnya masing-masing, 3) kongres mulai diadakan secara bergiliran diseluruh kota Indonesia, seperti kongres Muhammadiyah ke 15 di Surabaya, kemudian berturut-turut setelah itu di selenggarakan di kota Pekalongan, Solo, Bukittinggi, Makasar dan Semarang, 4) bea siswa, khitanan massal, memperbaiki badan perkawinan dan menjodohka putra-putri Muhammadiyah,

penurunan gambar KH. Ahmad Dahlan, karena ada indikasi mengkultuskan beliau, 5) member kebebasan pada golongan muda untuk mengekspresikan cara-cara berdakwah.

KH. Hisyam, lahir Yogyakarta, 10 November 1883, pada periode ini perkembangan sekolah sekolah Muhammadiyah tumbuh subur bak jamur, karena beliau lebih memperhatikan tentang pendidikan dan pengajaran. Gagasannya, tentang 1) ketertiban administrasi dan manajemen organisasi, 2) modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sampai masa berakhir kepemimpinannya tahun 1932 telah berdiri 103 volkschool, 47 Standaardschool, 69 hollandschool Inlandsche School (HIS), dan 25 Schael School , yaitu sekolah lima tahun yang menyambung ke MULO (Meer Uitgebroid lager Onderwijs) setara dengan SMP saat ini., 5) menerima subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.

Mas Mansyur, lahir Surabaya 25 Juni 1896, pahlawan nasional dan anggota 4 serangkai dalam pergerakan Nasional Indonesia. Gagasannya, 1) membentuk majlis diskusi bersama (Tawsir al- Afkar) berdiri karena latar belang kekolotan masyarakat Surabaya 2) membebaskan tanah air dari penjajahan, 3) menerbitkan majalah Suara Santri, 4) memperbolehkan bunga bank.

Ki Bagus Hadikoesoemo, lahir Yogyakarta, dengan nama R Hidayat, 24 November 1890, merupakan tokoh kuat patriotik, anggota BPUPKI dan PPKI. Gagasanya, 1) sangat besar peranannya

dalam mukodimah UUD 1945, dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, peradaban, dan keadilan, 2) merumuskan pokok-pokok pikiran KH. Ahmad Dahlan yang dijadikan muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, 3) memperlakukan hukum agama Islam, 4) menentang penghormatan kepada dewa matahari pada masa pemerintahan Jepang,

Prof. Dr. Amin Rais, lahir di Solo, 26 April 1944, ia politikus yang pernah menjabat ketua MPR periode 1999 -2004, seorang yang kritis pada kebijakan pemerintah, dijuluki "King Maker" dalam jabatan Presiden Indonesia saat awal reformasi. Gagasannya, 1) mendirikan PAN dan membawa organisasi ke partai politik, 2) mendukung evaluasi kontrak karya terhadap PT Freeport Indonesia.

Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, lahir Sijunjung Sumatera Barat, 31 Mei 1935, tokoh ilmuwan yang mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat, sikap yang plural, kritis dan bersahaja. Gagasannya tertuang dalam tulisan-tulisannya seperti dalam buku *Dinamika Islam dan Islam Mengapa Tidak ?*

Prof. Dr. Din Syamsudin, lahir Sumabawa Besar, Nusatenggara Tenggara Barat, 31 Agustus 1958, politisi yang saat ini masih menjabat sebagai ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gagasannya, ia memandang bahwa terorisme lebih relevan bila dikaitkan dengan isu poliik dibanding dengan isu idilogi, ia juga tidak senang bila

sebagian kelompok umat Islam menggunakan label Islam dalam melakukan aksi terorisme, menurutnya, aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam akan merugikan umat Islam baik dalam tingkat internal umat Islam atau pada skala global.

HAMKA, nama singkatan dari Haji Abdul Malik Karim 'Amrullah (Maninjau, Sumatera Barat 16 Februari 1908 – Jakarta, 24 Juli 1981), tokoh dan pengarang Islam. Putera seorang ulama terkemuka, terkenal dengan Haji Rasul dan mendapat gelar doctor dari Al- Azhar (1955), membawa pembaharuan dalam soal agama di Minangkabau , pendidikan formal SD tetapi banyak belajar sendiri , terutama dalam bidang agama. Keahlian dalam Islam diakui oleh Internasional sehingga mendapat gelar kehormatan dari Al-Azhar tahun 1955 dan Universitas Kebangsaan Malaysia (1976). Tahun 1924 beliau merantau di pulau Jawa, untuk belajar antara lain kepada H.O.S. Tjokroaminoto dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Karya tulisnya adalah, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Merantau ke Deli, Di Dalam Lembah Kehidupan.

H. Abul Karim Oei (Oei Tjen Hien), lahir di Padang Panjang, 1905, mantan anggota parlemen RI dan mendirikan organisasi etnis Tionghoa Islam dengan nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia/ PITI. Mantan komisaris BCA dan aktif dalam pembauran / asimilasi Gagasannya, kesadaran harus hidup keluar dari lingkungan etnisnya.

NAHDHATUL 'ULAMA (NU)

A. Sejarah dan Perkembangan NU

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 silam sebenarnya tak bisa dilepaskan dengan perkembangan kelompok Islam yang secara relatif berhaluan pembaruan ke arah “yang disebut” pemurnian (*purifikasi*) ajaran Islam. Organisasi Muhammadiyah—didirikan di Yogyakarta pada 1912 oleh KH Ahmad Dahlan—yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda dengan kebiasaan praktik-praktik keagamaan (Islam) masyarakat lokal merupakan bagian dari efek pemicu (*trigger effect*) yang mempercepat lahirnya NU.

Ditambah lagi pada saat itu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah di bawah pengaruh kuat ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi) dianggap sudah kebablasan karena sudah sampai pada keinginan membongkar makam Rasulullah SAW. Kalangan ulama Indonesia berhaluan Sunni akhirnya membentuk komite (yang disebut Komite Hijaz) yang selanjutnya diutus khusus untuk menemui Raja Fahd di Arab Saudi (Alfian, 1999).

Di balik sikap reaktif itu, sebenarnya para ulama Sunni Indonesia memiliki misi mempertahankan budaya pluralisme kebangsaan yang membumi.

Pertama, pada tingkat lokal, para ulama NU tidak ingin membenturkan ajaran Islam dengan kebiasaan beragama masyarakat setempat. Tepatnya, para ulama NU berupaya selalu mengharmoniskan hubungan antara pengamalan agama dan praktik budaya lokal.

Kedua, secara universal, para ulama NU berupaya memperkenalkan dan menghendaki penghargaan terhadap nilai-nilai perbedaan yang eksis di dalam masyarakat dunia, dengan menunjukkan toleransi dan pembelaannya terhadap

upaya atau keinginan untuk menghilangkan kebiasaan.

Terlebih hal itu, oleh pihak NU, secara prinsip ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalaupun dianggap bertentangan, maka merupakan konsekuensi dari keberagaman yang memang sudah ada, yakni masing-masing tentu saja memiliki pembenaran atau argumen teologis (Alfian, 1999). Dalam kerangka seperti itulah NU berdiri dan eksis sebagai pengayom kepentingan semua kekuatan dengan gerakan yang berorientasi kerakyatan.

Infrastrukturnya sejak awal dibangun di atas tiga pilar utama, semangat kebangsaan (*nahdlatul wathan*), semangat atau kebangkitan ekonomi (*nahdlatul tujjar*), dan gerakan pengembangan pemikiran (*taswirul afkar*)—Islam berbasis kultural di Indonesia. Dalam perjalanannya, karena watak reaktif itu pula NU kerap kali terjebak pada situasi temporer, terutama terkait dengan agenda politik praktis. Para tokohnya tampaknya tak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam kancah politik praktis, dengan alasan-alasan yang pada dasarnya bersifat pragmatis. Apalagi, di kalangan tokoh NU itu muncul kesadaran tentang adanya basis massa politik yang riil yang secara kuantitatif memiliki posisi tawar kuat (Anam, 1985).

Barang kali juga ada anggapan, “dari pada basis massa dimanfaatkan oleh pihak lain, lebih baik untuk kepentingan politik dan ekonomi kalangan internal NU sendiri”. Makanya, tidak heran kalau perjalanan NU tidak bisa dilepaskan dengan kiprah politiknya yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan segelintir elite NU sendiri.

Pada rentang 1945–1952 NU tergabung dalam Partai Masyumi. Melalui muktamar di Palembang pada 1952, NU mendirikan parpol sendiri, yakni Partai NU dan ikut Pemilu 1955. Pada 1971, oleh pemerintah Orde Baru Partai NU dengan paksa digabung (fusi) di dalam PPP, hingga kemudian menyatakan diri lepas dari politik praktis melalui Muktamar NU di Situbondo 1984. Mulai saat

itulah NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan kembali ke Khittah 1926, yang pada dasarnya mereposisi NU ke arah ke bangsaan tanpa politik praktis dalam rangka mengimplementasikan substansi ketiga pilar di atas. Tetapi para tokoh atau elite NU sudah telanjur menikmati manfaat pragmatis dunia politik, yang kemudian ternyata semakin menyulitkan operasionalisasi konsep kembali ke Khittah 1926. Dalam konteks ini setidaknya terdapat tiga alasan utama sulitnya melepas dunia politik (Bruinessen, 1999).

Pertama, kepemimpinan NU selama 32 tahun (1952–1984) berada langsung di bawah politisi, yakni KH Idham Chalid. Budaya NU kemudian sangat kental dan berurat akar politik. Sehingga, kendati NU sudah menyatakan diri kembali ke Khittah 1926, realitasnya para elite politik dan tokoh-tokoh internal NU yang menyimpan syahwat politik tak bisa menahan dirinya lagi untuk tidak melampiaskan *libido* politiknya itu.

Kedua, adanya stok massa yang tersedia bisa dikendalikan dan dimanfaatkan seperti yang diinginkan oleh para elitnya. Maka tidak heran jika dari masa ke masa, dan terutama di era reformasi sekarang ini, basis massa NU itu menjadi “ladang emas” yang dieksploitasi dan didulang suaranya oleh para politisinya.

Ketiga, munculnya generasi baru NU yang terpelajar dan melek politik. Kecenderungan ini memang baru terasa sekali di era 1990-an hingga sekarang, saat begitu banyak warga Nahdliyin berhasil memberikan pendidikan yang baik bagi generasi penerus mereka, yang menimba ilmu baik di dalam maupun di luar

negeri. Mereka ini sangat menyadari potensi diri, serta melihat kesempatan dan daya dukung massa yang memungkinkan untuk tampil dalam kancah politik praktis.

Kondisi seperti itu barangkali memang sulit dihindari, namun tidak perlu resah kalau kelak makna ke-NU-an semakin lama semakin pudar. Sebab, semua sumber dayanyaboleh jadi terserap ke dalam pusaran politik praktis yang dimainkan oleh elite NU sendiri. Kalau dulu, setidaknya di era ke pemimpinan Gus Dur yang cukup mengesankan itu, faksi-faksi di NU masih didominasi oleh gerakan kultural, aktivis kebangsaan dan intelektual, sementara faksi politik berada di pinggiran, saat ini justru faksi politiklah yang menjadi kekuatan dominan (Ecip, 1994).

Mereka mendistribusikan diri dalam jamaah NU. Namun, kalau jujur diakui, para politisi kita sekarang ini, termasuk di dalamnya yang berbasis NU, sudah mengalami disorientasi. Se muanya cenderung hanya berpikir untuk kepentingan materi-duniawi, sangat tidak peduli dengan orientasi kebangsaan dan kerakyatan sesuai jati diri NU.

Apalagi mereka umumnya sangat tidak berkarakter dalam berpolitik, sementara perjuangan kebangsaan dan kerakyatan baru bisa terwujudkan apabila politisinya berkarakter dan berorientasi kerakyatan. Jika NU di usianya yang ke-94 tahun saat ini masih tidak melakukan introspeksi, bukan mustahil organisasi massa Islam tradisional terbesar ini ke depan hanya akan menjadi wadah simbolis berupa papan nama yang kehilangan massa dan hakikatnya (Feillard, 1999).

B. PEMIKIRAN/GAGASAN TOKOH NU

Setelah mendirikan pondok Pesantren Tebu Ireng, KH. Hasyim Asy'ari mewarnai lembaga pendidikannya dengan pandangan dan metodologi

tradisional. Ia banyak mengadopsi pendidikan Islam klasik yang lebih mengedepankan aspek-aspek normatif, tradisi belajar-mengajar, dan etika dalam belajar yang dipandang telah mengantarkan umat Islam kepada zaman keemasan. Dalam karyanya, *Adab al-'Alim wa- Al-Mutta'allim*, KH. Hasyim Asy'ari terlihat banyak dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Islam klasik dan penulis-penulis klasik seperti Imam al-Ghazali dan Al-Zarnuji.

Namun hingga sekarang pesantren dan NU adalah pilar tegaknya Islam tradisional, serta menjadi basis gerakan NU sejak masa perjuangan melawan penjajah hingga zaman sekarang. Sampai saat ini lembaga pendidikan pesantren masih tetap eksis dan *survive* dengan segala kemajuan pembaharuan, seperti pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Institut Agama Islam Ibrahimy, Pondok Pesantren Nurul Jadid, Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Darul Ulum, Akper, dll.

NU menganut paham *Ahlussunnah waljama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqh mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Meskipun mengakui tiga madzhab yang lain: Hanafi, Maliki, Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran *ahlussunnah wal jamaah*, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun

sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham *Ahlussunah wal Jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan Kaum ekstrem *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiric. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Jadi selain mengutamakan dasar paham keagamaannya dari Al-Quran dan Sunnah NU juga mengembangkan pemikiran-pemikiran terdahulu yang telah disebutkan di atas. Menurut Ahmad Zahro, NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, as-Sunnah, *al-ijma'* dan *al-qiyas* (Zahro, 2004).

Berbeda dengan organisasi-organisasi tradisional yang lain, NU tidak hanya mengaku sebagai penganut paham Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah, tetapi juga mengembangkannya secara lebih komprehensif. Menurut ulama-ulama NU, Aswaja adalah corak keberagaman umat Islam, baik pemahaman maupun praktik, yang didasarkan atas tradisionalisme mazhabiyah. Ia merupakan sistem ajaran Islam yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi dan para Sahabatnya. Untuk merinci lebih jelas rumusan Aswaja, ulama U menempatkan kalam sebagai sistem kepercayaan, fikih sebagai norma yang mengatur kehidupan, serta tasawuf sebagai tuntunan dalam membina akhlak dan mencerahkan rohani, bukan sebagai ajaran yang terpisah satu sama lain, melainkan sebagai

tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran Islam. Ulama NU telah merumuskan paham Aswaja tersebut secara lebih konkret untuk menjadi pegangan organisasi dan warga nahdliyin, yakni dalam I'tiqad menganut teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dalam fiqh mengikuti salah satu dari empat imam mazhab: Abu Hanafi, Maliki ibnu Anas, Muhammad Idris asy-Syafi'I, dan Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan dalam tasawuf mengikuti ajaran Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali (Effendi, 2010).

Dalam perkembangan NU, munculnya gairah baru intelektualisme NU tidak lepas dan keputusan NU meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan politik praktis dengan konsep kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984. Dengan keputusan itu, warga dan elit NU tidak lagi disibukkan urusan-urusan politik praktis sehingga mempunyai waktu lebih banyak untuk memerintahkan masalah pendidikan. Setelah itu, terpilihnya kiyai Achmad Siddiq sebagai Rais 'Aam Syuriyah dan Abdurahman Wahid sebagai ketua umum Tanfiziyah PBNU pada muktamar di Situbondo tahun 1984 mempunyai pengaruh signifikan perkembangan pemikiran Islam di NU mempunyai makna yang strategis untuk terus menjadikan NU sebagai eksemplar gerakan intelektual, bukan semata-mata sebagai gerakan politik (Hidayat, 2014).

JAMI'ATUL WASHLIYAH

Berdirinya Al-Washliyah di latar belakang oleh kesadaran beberapa pelajar dan guru yang tergabung dalam perguruan Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT), dimana pada saat itu mereka berkeinginan untuk membuat wadah organisasi yang lebih besar dari organisasi sebelumnya "*Debating Club*" yang tampaknya cukup berhasil dalam program- programnya dan dipandang sangat bermanfaat. *Debating Club* merupakan sebuah wadah organisasi kecil untuk mendiskusikan pelajaran maupun persoalan-persoalan sosial keagamaan yang

sedang berkembang di tengah masyarakat. Pendirian *Debating Club* pada tahun 1928 ini mulanya sebagai sikap kritis para alumni dan murid senior MIT tentang diskusi-diskusi mengenai Nasionalisme dan paham keagamaan yang terutama didorong oleh kaum pembaharu (Nizar, 2013).

Organisasi Al-Washliyah didirikan di Sumatra Utara tepatnya di kota Medan pada tanggal 30 November 1930 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1349 H, diberi nama Al- Washliyah yang bermakna organisasi yang ingin menghubungkan dan mempertalikan. Hal ini berkaitan dengan keinginan memelihara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama baik antarsuku, antarbangsa, dan lain-lain (Daulay, 2006).

Berdirinya organisasi Al-Washliyah tidak tergantung pada seorang tokoh sentral karismatik sebagaimana halnya Muhammadiyah ataupun NU, pendirian dan pertumbuhan organisasi ini merupakan hasil upaya bersama beberapa tokoh dengan peran dan keistimewaannya masing-masing. Syekh Muhammad Yunus adalah tokoh yang dituakan dan biasanya dianggap sebagai pendiri Al-Washliyah bukanlah yang berperan penuh atas pendirian Al-Washliyah melainkan adanya tokoh-tokoh lain diantaranya Abdurrahman Syihab yang mempunyai kemampuan tinggi dalam rekrutmen anggota, Arsyad Thalib Lubis dengan ilmu pengetahuan Islam yang sangat tinggi, Udin Syamsuddin dengan keahlian administrasi dan manajemen yang mana kesemuanya dipersepsi sebagai orang-orang yang berperan penting dalam pendirian dan pengembangan organisasi ini sehingga dikalangan pengikutnya tidak dijumpai kecenderungan untuk menganggap salah satu pimpinannya sebagai tokoh sentral.

Secara organisatoris, Al-Washliyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berakidah Islam dan bermadzhab Syafi'i serta beriktikad *ahlussunnah wal jam'ah*. Dengan misi berusaha memperjuangkan kemerdekaan

negara dari jajahan penjajah dan berorientasi pada kemajuan pendidikan Islam dengan pembaharuan pada sistem pendidikan (Hasbullah, 1996).

Adapun fase perkembangan AI-Washliyah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, fase berdirinya sampai menjelang kemerdekaan (1930-1942).

Dalam fase ini kegiatan terpusat kepada pembinaan kader ulama dan pendidik. Kader-kader fase inilah yang melanjutkan usaha AI-Washliyah sekarang ini.

Kedua, fase facum yaitu sewaktu masuknya penjajahan Jepang sampai kemerdekaan RI (1942-1947). Dalam fase ini kegiatan terarah kepada melawan atau menumpas penjajahan. Kegiatan pendidikan berhenti dan beralih kepada kegiatan pembentukan Laskar Allah yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Hizbullah, Sabilillah, Tentara Pelajar, dan Dapur Umum. Kegiatan penulisan ulama menulis "Tuntunan Perang Sabil" oleh alm. H.M. Arsyad Thalib Lubis, dan "Do'a ke Medan Perang" disusun oleh Pemuda AI-Washliyah.

Ketiga, fase perjuangan politik (1947-1955), yaitu di mana Indonesia sedang menyusun negaranya dengan undang-undang dan kabinetnya. Kegiatan tertuju kepada mensukseskan pemilu I dan turut menyiapkan konsep bernegara dengan undang-undang konstituante.

Keempat, kembali fase pembinaan (1955-1965). Pembinaan organisasi dan pendidikan meluas keseluruh tanah air Indonesia, pulau Jawa dan Kalimantan.

Kelima, fase perluasan Misi Zending dan Penyiaran Islam (1965-1972). Pada fase ini, pelajar dan mahasiswa serta putra-putri dan

pemuda Al-Washliah, giat mengislamkan suku terasing di pegunungan Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kepulauan Mentawai, dan Irian Jaya.

Keenam, fase agak suram (1972-1983) dimana keterlibatan anggota Al-Washliyah dalam partai politik mempengaruhi akan kesegaran jalannya organisasi dan pendidikan Al-Washliyah. Hal ini disebabkan karena mereka lebih mengutamakan partainya dari pada pembinaan umat dan ukhuwah Islamiyah.

Ketujuh, fase penataan kembali dan perluasan yaitu (1983 sampai mukhtamar ke XVII). Diterbitkan kembali organisasi seperti telah dilaksanakan kunjungan-kunjungan ke madrasah-madrasah di Sumatera Utara, konferansi wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pemberian mandat untuk pembentukan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Irian Jaya, pendataan sekolah-sekolah dan perguruan Al-Washliyah (Nizar, 2013).

Selain itu, dalam operasionalnya Al-Washliyah didukung oleh Badan Otonom Organisasi yang meliputi: muslimat Al-Washliyah (Organisasi Wanita), Gerakan Pemuda Al-Washliyah (Organisasi Pemuda), Angkatan Putri Al-Washliyah (Organisasi Putri), Ikatan Putra-Putri Al-Washliyah (Organisasi Remaja), dan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (Organisasi Mahasiswa). Inilah gambaran sekilas tentang Al-Washliyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan dan pendidikan Islam di Indonesia dari waktu ke waktu yang mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Tetapi hal yang terpenting untuk diungkap kali ini adalah bagaimana peranan dan kiprahnya dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam (Nizar, 2013).

KESIMPULAN

Organisasi-organisasi islam di Indonesia terbentuk karena faktor pembaruan pemikiran islam yang di pelopori oleh orang-orang dari Timur Tengah seperti, Rasyid Ridha, Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan lain-lain. Pada awalnya pembaruan pemikiran dibidang pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab di Indonesia yaitu organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Nahdlatul Ulama di Surabaya (1926) dan Al Washliyah (1930)

Peran Organisasi-organisasi tersebut bisa dikatakan sangatlah luar biasa baik itu dibidang ekonomi, pendidikan, politik, maupun dalam mencapai kemerdekaan bagi negara Indonesia. Hal tersebut juga masih kita rasakan sampai sekarang ini dimana organisasi- organisasi islam tersebut banyak yang masih eksis dan menjaga kestabilan di indonesia didalam sebuah pemerintahan

REFERENCES

- Abdullah, Taufik, *School and Politics, the Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933* (New York: Cornel University, 1967)
- Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of Muslim a Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989)
- Alfian, Alfian, "Memahami Polarisasi Politik Ulama", *Kompas*, 1999
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Solo: Jatayu, 1985)
- Azra, Azyumardi, 'Mengkaji Ulang Modernisme Muhammadiyah', *Kompas*, 1990
- Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1999)
- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Dkk, Ahmad Asep Hidayat, *Studi Islam Di Asia Tenggara* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

- Ecip, Sinansari, *NU, Khittah Dan Godaan Politik* (Bandung: Mizan, 1994) Effendi, Djohan, *Pembauran Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan Di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)
- Feillard, Andree, *NU Vis a Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999)
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan DanPerkembangan.* (Jakarta: LKiS, 1996)
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam (Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980)
- NU, *Anggaran Dasar, 'Bab II Pasal 3 Tentang Azas'* (Jakarta), p. 46 'Profil Muhammadiyah', pp. 4-5
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respon Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998) Siddik, Dja'far, 'Dinamika Organisasi Muhammadiyah Di Sumatera Utara', *Journal ofContemporary Islam and Muslim Societies*, 1.1 (2017), 1-40
- <<https://doi.org/10.30821/jcims.v1i1.322>>
- Siddik, Dja'far, 'Konsep Pendidikan Islam Muhammadiyah: Sistematisasi Dan Interpretasi Berdasarkan Perspektif Ilmu Pendidikan' (UIN SUKA Yogyakarta, 1997)
- Suprayitno, Suprayitno, 'ISLAMISASI DI SUMATERA UTARA: Studi Tentang Batu Nisan Di Kota Rantang Dan Barus', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36.1 (2012), 154-73 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.113>>
- Suwamo, M. Margono Puspo, *Gerakan Islam Muhammadiyah* (Yogyakarta: Persatuan,1986)
- Witjosukarto, Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan & Pengajaran Islam Oleh Pergerakan Muhammadiyah* (Malang: Ken Mutia, 1966)
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta:LKiS, 2004)